

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# DPRD DKI Dorong Pemda Gratiskan Sekolah Swasta

**D**EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat realisasi sekolah swasta gratis.

Sekrestaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak mengatakan jika DPRD telah mengusulkan sekolah swasta gratis sejak setahun lalu.

"Sebenarnya kami sudah bicarakan itu sejak setahun yang lalu dan kita mengharapkan Dinas Pendidikan membuat kajian akademiknya lah ya, secepatnya, supaya nanti secepatnya di APBD 2025 ini udah bisa kita luncurkan," kata Jhony melalui sambungan telepon, Selasa 16 Juli 2024.

Menurut Jhony, seluruh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta telah sepakat jika Pemprov DKI Jakarta menyediakan sekolah swasta gratis bagi masyarakat.

Hal ini lantaran bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dinilai bukan menjadi solusi bagi warga Jakarta untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun.

"Kenapa? Karena KJP tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, karena ternyata faktanya anak-anak kita yang sekolah di sekolah swasta, banyak mereka itu yang putus sekolah karena tidak sanggup membayar," paparnya.

Ditambah lagi, banyak temuan warga Jakarta yang tidak mampu menebus ijasah di sekolah karena orangtua yang tidak mampu.

"Kalau kita mengingat aturan pendidikan kita wajib belajar 12 tahun, kan itu kalau ada yang masih putus sekolah, ada orang yang sudah lulus karena ada tunggakan karena kemiskinan orangtua ijasah ditahan, nah itu kan wajib belajar 12 tahun hanya sekedar jargon," tukas Jhony.

Lebih lanjut, Jhony menilai, sekolah swasta gratis ini juga bertujuan

menciptakan rasa keadilan di lingkungan pendidikan.

Pasalnya masih banyak ditemukan orangtua murid yang mampu namun masih bisa menikmati sekolah gratis hanya karena masuk negeri.

"Banyak orang yang diterima di sekolah negeri orang berada, mereka gratis, kenapa orang-orang yang tidak mampu tidak diperhatikan dalam hal ini oleh Pemprov DKI Jakarta," tukasnya.

Maka dari itu, Jhony berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji sekolah swasta gratis yang direkomendasikan DPRD DKI Jakarta ini.

"Kita lihat kita udah punya kesamaan pandangan, hanya kita lihat nanti bagaimana diluncurkan ini supaya lebih cepat," pungkasnya. **(Pandi/den)**